

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Peneliti akan menarik beberapa kesimpulan secara teoritis dan empiris dari hasil penelitian dengan menggunakan teori George C. Edwards III, yaitu:

- a) Komunikasi dalam penerapan e-Government di Disdikbud Jawa Tengah masih kurang dalam sub-indikator kejelasan dan konsisten. Hal tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan e-Government.
- b) Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-Government di Disdikbud Jawa Tengah juga masih kurang baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Dalam implementasi kebijakan e-Government, anggaran dana instansi ini juga masih kurang untuk bisa meningkatkan implementasi e-Government dan menyediakan fasilitas yang memadai sehingga aspek sumber daya masih memiliki “pekerjaan rumah” yang cukup banyak.
- c) Aspek disposisi dan komitmen dalam implementasi kebijakan e-Government belum memuaskan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya SOP implementasi e-Government sebagai bentuk komitmen dari Disdikbud Jawa Tengah

- d) Dalam aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan e-Government di Disdikbud Jawa Tengah masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya SOP yang secara khusus membahas tentang implementasi kebijakan ini sehingga belum ada petunjuk jelas dalam implementasi kebijakan ini dan menyebabkan hambatan yang cukup berarti.
- e) Masyarakat menilai bahwa adanya media sosial Disdikbud Jawa Tengah bisa mempermudah akses mereka dalam memberikan aduan dan pertanyaan terkait pendidikan. Selain itu, informasi yang diberikan cukup terbuka dan informatif meskipun masih terdapat beberapa catatan dari mereka seperti operator yang cukup lama dalam memberikan balasan, jawaban operator yang terkadang belum menjawab pertanyaan mereka, dan lainnya.

Pada intinya, implementasi kebijakan e-Government di Disdikbud Jawa Tengah diterapkan melalui website dan media sosial. Website memuat banyak informasi khususnya terkait pendidikan dan terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari layanan pengaduan laporgub, layanan PPDB, dan lainnya. Media sosial digunakan oleh Disdikbud Jawa Tengah untuk mendistribusikan berbagai macam informasi serta memberikan wadah masyarakat untuk memberikan aduan atau pertanyaan. Selain itu, implementasi kebijakan ini memiliki nilai transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan

pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Hanya saja, instansi ini belum memiliki SOP yang secara khusus mengatur kebijakan e-Government padahal aspek tersebut sangatlah penting dan bisa sangat berpengaruh kepada aspek lainnya. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan e-Government apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III masih kurang memuaskan dan masih mengalami hambatan yang cukup berarti sehingga diperlukan evaluasi untuk mengatasi serta meningkatkan implementasi kebijakan ini.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran yang diberikan kepada Disdikbud Jawa Tengah, yaitu:

1. Pengadaan SOP atau Standar Operasional Prosedur yang secara khusus mengatur tentang implementasi kebijakan e-Government. Hal tersebut dikarenakan SOP menjadi bagian dalam implementasi sebuah kebijakan di dalam organisasi. Dengan adanya SOP, organisasi akan memiliki pedoman dan dasar pelaksanaan yang lebih jelas dalam implementasi kebijakan. Terlebih lagi, adanya SOP akan memudahkan para pegawai sebagai pelaksana kebijakan dalam menyesuaikan diri ketika terjadi suatu perubahan. Salah satu hambatan yang dikeluhkan oleh pegawai Tim PPID dalam implementasi kebijakan ini adalah belum adanya tupoksi khusus yang mengatur tentang implementasi e-Government sehingga pembagian tugas dan penanggung jawab kegiatan hanya

dilakukan secara lisan. Maka dari itu, solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pembuatan SOP terkait implementasi kebijakan e-Government. Adanya SOP yang secara khusus mengatur tentang implementasi kebijakan akan mengurangi peluang terjadinya miskomunikasi dan pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pegawai.

2. Anggaran dana guna implementasi kebijakan e-Government bisa lebih ditingkatkan dan menjadi sebuah prioritas. Hal tersebut mengingat bahwa kebijakan ini membutuhkan anggaran dana yang lebih besar untuk meningkatkan implementasi kebijakan e-Government dan menyediakan saluran informasi yang lebih bagus kepada masyarakat Jawa Tengah.
3. Mengadakan integrasi data dan dokumen ke dalam data elektronik sehingga proses permintaan data yang berbelit-belit akan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu. Terlebih lagi, proses distribusi tugas akan lebih mudah dan bisa mengurangi waktu pengerjaan sehingga tugas yang diberikan oleh atasan bisa cepat terselesaikan.
4. Disdikbud Jawa Tengah bisa menambah jumlah operator dalam menanggapi aduan dan pertanyaan masyarakat. Hal tersebut bisa menjadi solusi atas keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa jawaban dari operator masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

5. Pengadaan fitur feedback dua arah di website secara langsung agar interaksi antara masyarakat dengan operator bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi di era digital dan menghasilkan interaksi yang baik antara keduanya.